

Besaran Kerugian Nelayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan : Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Ernani Lubis, Anwar Bey Pane, Retno Muningsgar, dan Asep Hamzah

Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK IPB

Email : ernani_ipb@yahoo.com

Received 02 April 2012; received in revised form 20 April 2012;
accepted 05 Mei 2012

ABSTRACT

The Fisherman livelihoods at sea are filled with uncertainty and the catch marketing system is not optimum so that fisherman has difficulty in the capital. In this condition, the fisherman to seek capital through the process quickly and with no collateral even if in the end didn't realize that fisherman has actually entangled and lost money. The financiers in general is often called middlemen/pengijon that certain conditions have created a monopoly system because they operate from the provision of capital, the factors of production to determine the marketing of fish. The research objective was to determine how far the dependence of fishermen in obtaining capital and how much is the actual loss occurred. This study uses the case of the dependence of fisherman on middlemen in PPN Palabuhanratu by quantitative descriptive analysis. The research has gotten the results that the majority (90%) of fisherman PPN Palabuhanratu use middlemen to obtain fishing capital. This is because the lending process easier, without collateral, but most of the catch must be sold to the middleman without passing auction. Based on formulated results, the fishermen lose between 2000.00 to 5000.00 IDR/kg if their catch is sold to middlemen. Losses are also caused by the price of diesel at the middleman or the retailer is different IDR 1000.00/liter compared with it price in the pump. This loss is especially for fishing line and gillnet fisherman. The role of fishing ports would need to be optimized in efforts the fishing supplies provision and the implementation of the fish auction system as a whole in order to the small fisherman has the bargaining power in auction system and get the cash money from the catch sale.

Key words: loss, the fisherman, fishing ports, PPN Palabuhanratu

ABSTRAK

Mata pencaharian nelayan di laut yang sarat dengan ketidakpastian dan sistem pemasaran hasil tangkapannya yang tidak optimal membuat nelayan kesulitan dalam permodalan melaut. Pada kondisi ini nelayan mencari modal melalui proses yang cepat dan tanpa agunan walaupun pada akhirnya tidak disadari bahwa nelayan sebenarnya telah terjebak dan merugi. Pemberi modal tersebut pada umumnya sering disebut tengkulak/pengijon yang pada kondisi tertentu telah menciptakan sistem monopoli karena mereka juga menyediakan modal, faktor-faktor produksi sampai menentukan pemasaran ikan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh ketergantungan nelayan dalam memperoleh permodalan melaut dan berapa besarkah kerugian yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kasus ketergantungan nelayan pada tengkulak di PPN Palabuhanratu melalui analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini telah mendapatkan hasil bahwa sebagian besar (90 %) nelayan PPN Palabuhanratu memanfaatkan tengkulak khususnya untuk memperoleh permodalan melaut. Hal ini dikarenakan proses meminjamannya lebih mudah, tanpa agunan namun sebagian besar hasil tangkapan harus dijual pada tengkulak tanpa melalui pelelangan. Berdasarkan hasil perhitungan, nelayan merugi antara Rp 2000,00 sampai Rp 5000,00/kg apabila hasil tangkapannya dijual kepada tengkulak. Selain itu kerugian juga karena pembelian solar di tengkulak atau pengecer berbeda Rp 1000,00/liter dengan harga SPBU khususnya nelayan pancing dan *gillnet*. Peran pelabuhan perikanan kiranya perlu dioptimalkan dalam mengupayakan penyediaan perbekalan melaut dan terlaksananya sistem pelelangan ikan secara menyeluruh agar nelayan kecil memiliki posisi tawar dalam tata niaga perikanan dan mendapatkan hasil penjualan secara *cash*.

Kata kunci : kerugian, nelayan, pelabuhan perikanan, PPN Palabuhanratu

I. PENDAHULUAN

Jeratan kemiskinan struktural merupakan salah satu gambaran penyebab kemiskinan pada masyarakat nelayan. Pengalaman selama ini telah menunjukkan bahwa tidak mudah mengatasi kemiskinan struktural yang membelenggu nelayan di berbagai segi kehidupan. Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, selain dipengaruhi sejumlah kelemahan internal, juga karena pengaruh faktor eksternal.

Keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih modern, dan tidak dimilikinya modal yang cukup adalah faktor-faktor internal yang seringkali menyulitkan usaha-usaha untuk memberdayakan kehidupan nelayan tradisional. Di sisi lain, sejumlah faktor eksternal, seperti makin terbatasnya potensi sumber-daya ikan yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan di hadapan tengkulak, keadaan infrastruktur pelabuhan perikanan, dan yurisdiksi daerah otonomi adalah beban tambahan yang makin memperparah keadaan (Sudarso, 2007)

Secara sosiologis pola mata pencaharian nelayan yang sarat dengan ketidakpastian membuat semacam relasi yang mudah berkembang yakni relasi patron-klien sebagai reaksi untuk menciptakan rasa aman sosial bagi masyarakat ini. Pola ini sedemikian berkembang dalam bentuk pinjaman uang atau modal dan sejenisnya yang mengikat, salah satunya adalah pola bagi hasil dengan pemilik modal yang sering disebut tengkulak. Kondisi ketiadaan modal/pinjaman membuat nelayan terjatuh dalam pola tengkulak ini. Para tengkulak pada kondisi tertentu telah menciptakan sistem monopoli. karena mereka beroperasi mulai dari penyediaan finansial, pemilikan faktor-faktor produksi, dan menentukan jalur pemasaran (Sinulingga, 2011).

Pelabuhan perikanan (PP) sebagai pusat ekonomi perikanan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perikanan tangkap yang perlu dimanfaatkan, diorganisir dan dikelola dengan baik. Pelelangan ikan

merupakan suatu aktivitas utama terpenting di PP yang perlu dikelola secara optimal, karena pada kegiatan pelelangan ikanlah sebenarnya ditentukan berapa besar penerimaan penjualan nelayan; yang pada tahap selanjutnya akan menentukan berapa besaran pendapatan nelayan (nelayan pemilik dan nelayan buruh). Pada pasal 3 UU no.31 tahun 2004 jo UU no 45 tahun 2009 tentang perikanan dikatakan bahwa salah satu fungsi pelabuhan perikanan adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan skala kecil. Dari fungsi ini sudah seharusnya pelabuhan perikanan dioptimalkan perannya terutama dalam mengupayakan berjalannya sistem pelelangan ikan agar nelayan kecil memiliki posisi tawar dalam tata niaga perikanan.

Lubis *et al* (2009) dalam penelitiannya yang dilakukan di empat PP/PPI yaitu PPS Nizam Zachman, PPN Palabuhanratu, PPI Pontap dan PPI Manggar menyimpulkan bahwa pelaku utama terkait kegiatan pelelangan ikan di TPI adalah pengelola, nelayan, pedagang dan pengolah ikan. Namun ditemui juga adanya pelaku tambahan yang memiliki peran tidak dapat diabaikan yaitu punggawa/juragan atau bisa dikatakan sebagai tengkulak yang mengklaim hak sebagai penjual ikan dari nelayan yang meminjam uang kepadanya. Hampir seluruh nelayan tradisional mengalami permasalahan kekurangan modal baik modal operasional melaut maupun untuk perbaikan unit penangkapannya. Nelayan-nelayan ini umumnya tidak memiliki akses ke pihak perbankan untuk melakukan peminjaman modal karena ketiadaan agunan. Sebagian nelayan pemilik mengalami keterikatan dengan punggawa/juragan dalam pola hubungan peminjaman uang dan kewajiban nelayan tersebut menjual hasil tangkapannya melalui punggawa/juragan.

Perhitungan seberapa besar kerugian nelayan akibat ketergantungan kepada tengkulak dan ketiadaan sistem pelelangan ikan di PPN Palabuhanratu merupakan tujuan penelitian ini. Kajian pendahuluan tidak berlangsungnya pelelangan ikan dan perhitungan kerugian yang diderita nelayan akibat jeratan sistem tengkulak menjadi sangat

penting sebagai langkah awal merumuskan sebuah kebijakan yang tepat.

II. BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2011 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu. Penelitian ini menggunakan metode kasus tentang kerugian nelayan dalam pemasaran hasil tangkapan di pelabuhan ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dalam upaya mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian. Data yang dikumpulkan berupa literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian baik dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, dokumen-dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data melalui studi lapang adalah untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara observasi lapang disertai dengan pengisian kuisioner dan wawancara.

Pengamatan dilakukan terhadap kegiatan pemasaran ikan di TPI, dalam hal ini adalah penjualan ikan dari nelayan ke tengkulak, penjualan ikan dari tengkulak ke pedagang, penjualan ikan dari nelayan ke pedagang langsung, pembelian bahan perbekalan dari nelayan ke tengkulak, ke pengecer di PPN Palabuhanratu dan sekitarnya. Wawancara dan pengisian kuisioner dilakukan kepada 45 responden nelayan dengan alat tangkap dominan yaitu pancing, bagan dan *gill net* untuk mengumpulkan data mengenai proses penjualan ikan dari nelayan PPN Palabuhanratu kepada tengkulak dan pembeli di TPI, perhitungan peminjaman dan pengembalian modal termasuk penentuan besarnya serta data yang terkait dengan permasalahannya. Responden nelayan meliputi nelayan dengan alat tangkap

dominan yaitu pancing/rumpon, bagan dan *gillnet*. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur melalui dialog langsung dengan pihak yang terkait yaitu nelayan, tengkulak, petugas TPI, Petugas KUD, Petugas Dinas Perikanan dan Kelautan, petugas HNSI dan Pemda Sukabumi. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling* yang dapat mewakili tujuan penelitian.

Analisis besaran kerugian yang diderita nelayan karena tidak berjalannya sistem pelelangan dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif sebagai akibat dari peminjaman modal ke tengkulak yang meliputi jenis dan besaran pinjaman, bunga dan sistem pengembaliannya.

Analisis kerugian nelayan dihitung berdasarkan penjualan hasil tangkapan dan pembelian bahan perbekalan. Kerugian nelayan ditinjau dari penjualan hasil tangkapan dapat dilakukan melalui penghitungan selisih antara harga dari nelayan pada konsumen langsung (A) dengan harga hasil tangkapan nelayan pada saat dibeli oleh tengkulak (B). Kerugian nelayan yang berasal dari harga bahan perbekalan dihitung berdasarkan selisih harga bahan perbekalan tersebut apabila dibeli dari tengkulak dan harga yang dibeli dari sumber langsung.

Sebaliknya keuntungan tengkulak terkait dengan pemasaran ikan di PP/PPI minimum dihitung dari pembelian hasil tangkapan dari nelayan, hasil penjualan kepada pedagang dan hasil penjualan bahan perbekalan kepada nelayan. Keuntungan tengkulak (Π Tk) dari hasil tangkapan adalah merupakan keuntungan dari pembelian hasil tangkapan nelayan (P_n) ditambah dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan kepada pedagang (P_d) dan mungkin ditambah *fee* (f) karena pengembalian hasil penjualan tidak dilakukan secara *cash*; dan ada kalanya ditambah keuntungan dari penjualan bahan perbekalan kepada nelayan (P_b). Sementara jumlah keuntungan tengkulak dapat dirumuskan :

$$\Pi Tk = P_n + P_d + f + P_b$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan pemasaran ikan dan permasalahannya

PPN Palabuhanratu sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Barat memiliki fasilitas dan tingkat operasional yang cukup baik. Aktivitas pelelangan ikan di TPI PPN Palabuhanratu periode 1993-2003 dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi. Pelelangan pada periode tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan praktek lelang yang seharusnya. Aktivitas penjualan ikan dilakukan di depan khalayak umum, penawar dengan harga tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang sehingga nelayan merasakan fungsi adanya TPI dan proses lelang yang dijalankan. Nelayan dan bakul merasa puas atas pelayanan pemasaran yang diberikan karena saling mengetahui harga jual yang berlaku di pasaran sehingga memperoleh manfaat dengan adanya pelelangan tersebut.

Tahun 2004 hingga sekarang, pengelolaan mekanisme pelelangan beralih kepada KUD Mina Mandiri Sinar Laut. Pada awalnya pengelolaan pelelangan ikan hasil tangkapan yang dilakukan oleh KUD Mina Mandiri Sinar Laut berjalan lancar, namun pada pertengahan tahun 2005 hingga saat ini pelelangan tidak berjalan. TPI tidak dipergunakan sebagaimana mestinya secara optimal sehingga memungkinkan terjadi pasar perdagangan ikan yang monopolistik (Lubis *et al*, 2009). Kondisi ini mengakibatkan rendahnya harga jual bagi produsen/nelayan dan menghambat proses pencatatan data sehingga harus segera diantisipasi oleh pihak pelabuhan dan pemerintah daerah setempat guna memperbaiki pelelangan ikan agar nelayan/produsen memperoleh harga jual yang lebih baik.

Jumlah produksi maupun raman (nilai produksi) ikan hasil tangkapan yang tercatat di TPI (*fish by retribusi*) ketika dikelola oleh KUD mengalami perkembangan fluktuatif. Raman ikan diperoleh dari nilai transaksi ikan yang berhasil tercatat melalui TPI dan tanpa melalui TPI. Raman ikan yang tercatat tanpa melalui TPI (*fish by landing*) merupakan ikan

tujuan ekspor seperti hasil tangkapan tuna dan layur.

Sebagian besar nelayan belum memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, yaitu TPI untuk memasarkan ikan hasil tangkapannya. Nelayan lebih banyak yang terikat pada pemilik modal atau pedagang pengumpul atau bakul atau tengkulak sehingga memungkinkan rendahnya keikutsertaan nelayan dalam menjual ikannya di TPI. Modal yang terbatas dan pendaratan ikan yang umumnya dilakukan pada malam hari juga menjadi faktor penyebab enggan nelayan menjual ikannya langsung ke TPI. Pelelangan ikan dilakukan pada siang hari sehingga pada rentang waktu tersebut nelayan harus menambah biaya penanganan agar ikan tetap segar. Pihak pelabuhan belum dapat menyediakan fasilitas *cool room* sebagai tempat penyimpanan sementara sampai tibanya waktu lelang ikan. Rendahnya jumlah produksi hasil tangkapan ikan dan pemilik kapal yang merangkap sebagai bakul atau tengkulak juga turut berpengaruh terhadap tidak terlaksananya pelelangan ikan di TPI.

Dengan demikian, tidak semua nelayan merasakan fungsi dari TPI sehingga timbul keengganan nelayan untuk membayar retribusi. Sebagian nelayan merasa bahwa TPI tidak menguntungkan disamping juga kurangnya fasilitas yang disediakan bagi nelayan seperti *cool room* dan air bersih, sementara itu hasil tangkapan nelayan relatif sedikit atau semakin menurun dan apabila dikenakan biaya retribusi maka nelayan merasa terbebani, namun sebaliknya apabila permasalahan di atas teratasi maka retribusi tidak akan dipermasalahkan oleh nelayan seperti yang terjadi di PPI Pontap-Sulawesi Selatan bahkan nelayan bersedia memberikan retribusi sampai 10 % (Lubis *et al*, 2009). Kerugian lainnya adalah pada saat hasil tangkapan para nelayan dalam kondisi baik, nelayan tidak dapat menentukan harga sendiri karena keterikatannya pada tengkulak.

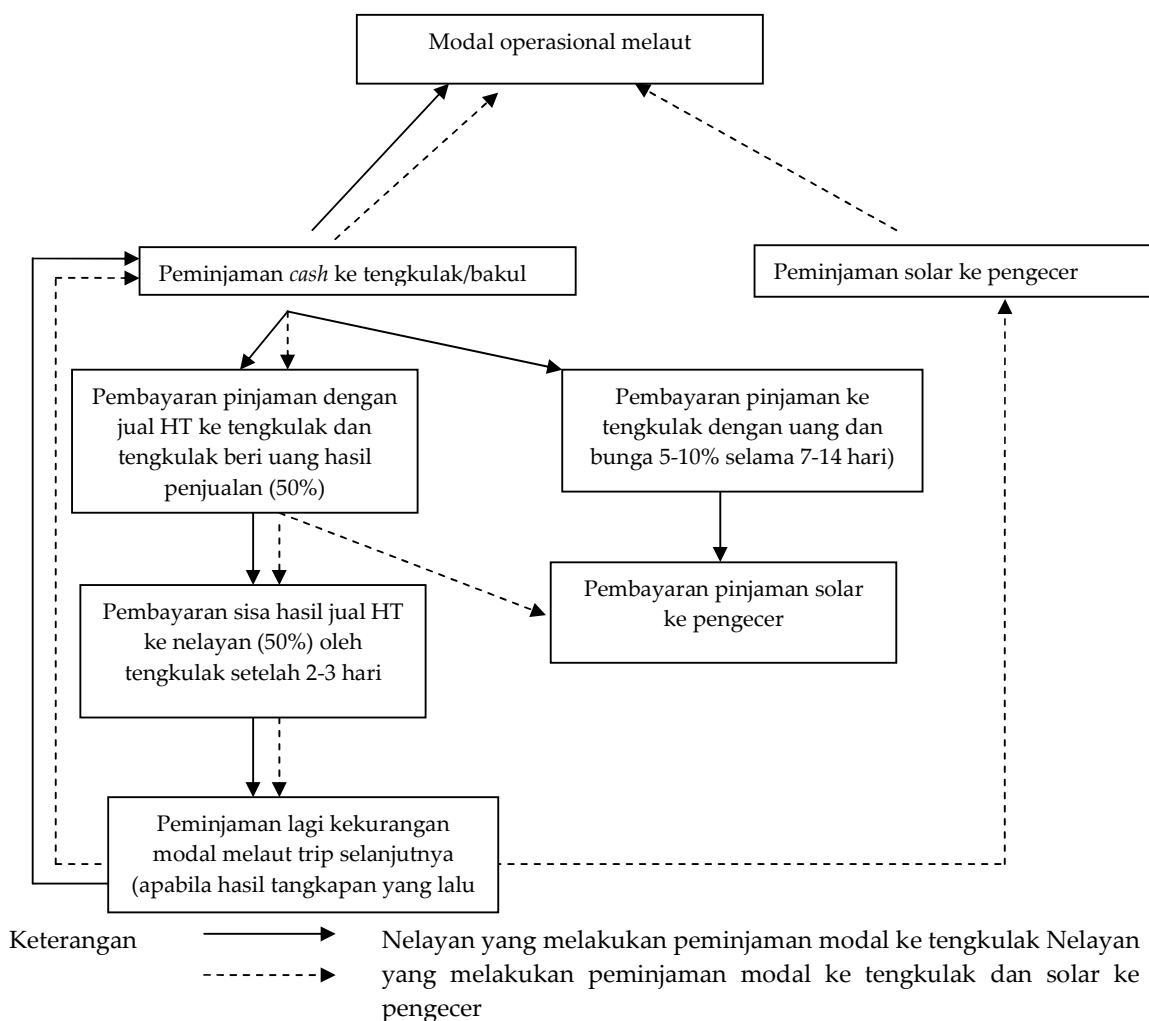
Besaran kerugian nelayan

Jenis dan besaran kerugian nelayan dalam kegiatan di pelabuhan perikanan adalah meliputi kerugian secara langsung sebagai akibat dari pinjaman modal

operasional melaut; akibat pembelian solar yang lebih mahal dari harga di SPBU dan pembayaran yang tidak dilakukan secara cash sedangkan kerugian tidak langsung adalah akibat dari menurunnya nilai hasil tangkapan karena terbatasnya pembelian es dan tersedianya ruangan pendingin. Kerugian menurunnya hasil tangkapan bagi nelayan yang sudah terikat peminjaman modal sebenarnya adalah sudah merupakan tanggungan tengkulak yang menerima hasil tangkapan dari nelayan. Dalam penelitian telah dihitung besaran kerugian sebagai akibat dari pinjaman modal operasional melaut dan akibat pembelian bahan perbekalan.

Mayoritas pengusaha pemilik kapal di PPN Palabuhanratu juga merangkap sebagai bakul. Kebiasaan lain dalam masyarakat perikanan Palabuhanratu yang sulit diubah

adalah sistem langgan yang sudah mendarah daging. Sistem langgan terjadi ketika nelayan tidak lagi memiliki modal untuk melaut, keadaan ini memaksa nelayan untuk meminjam uang kepada para tengkulak/pengijon. Bentuk timbal baliknya, nelayan harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada tengkulak tersebut dengan harga yang sudah ditentukannya. Nelayan payang ada kalanya meminjam uang cash ke tengkulak dan juga pinjam solar ke pengecer dengan harga solar lebih mahal Rp 1000,00/liter dari harga di SPBU. Setiap trip biasanya nelayan meminjam lagi untuk kekurangan modal melaut sehingga setiap kali mendaratkan, hasil tangkapan selalu dijual kembali pada pemberi modal tersebut. (Gambar1).



Gambar 1. Alur peminjaman dan pengembalian modal melaut nelayan Palabuhanratu, 2011

Didalam perhitungan, dicontohkan untuk hasil tangkapan pancing rata-rata perbedaan harga ikan tuna di tengkulak dan langsung di konsumen adalah Rp 2.000,00-Rp 5.000,00/kg atau harga di tengkulak lebih rendah dari harga di konsumen langsung (Tabel 1).

Tabel 1. Perbedaan harga hasil tangkapan pancing di tengkulak dan konsumen TPI, 2011

Jenis konsumen	Ikan tuna (Rp/kg)	Ikan cakalang (Rp/kg)
Tengkulak	10.000-40.000	10.000-28.000
Konsumen TPI	12.000-45.000	12.000-32.000
Perbedaan harga	2.000-5.000	2.000-4.000

Nelayan pancing rata-rata menangkap ikan 350 kg/trip sehingga secara total merugi Rp 700.000,00-Rp 1.750.000,00/trip. Hasil penjualan tidak dibayar secara cash oleh tengkulak atau menunggu rata-rata 3 hari sampai hasil tangkapan terjual kembali. Selama masa tunggu pembayaran, biasanya nelayan beristirahat sambil memperbaiki alat tangkapnya. Rata-rata *fishing trip* nelayan pancing/rumpon adalah 4 hari. Dengan demikian apabila masa *fishing trip* ditambah masa tunggu pembayaran, maka dalam sebulan nelayan pancing hanya bisa melakukan 4 trip atau nelayan merugi Rp 2.800.000,00-Rp 7.000.000,00/bulan.

Kerugian lain secara kuantitatif adalah dalam hal pembelian bahan perbekalan tidak ditemukan pada sebagian nelayan pancing karena solar, es dan air bersih dibeli sendiri oleh nelayan di SPBU bukan dibeli dari tengkulak dan pengecer. Namun terdapat sebagian nelayan yang meminjam solar pada pengecer dengan harga Rp 5.500,00/liter atau lebih mahal Rp 1000,00 dibandingkan dengan harga di SPBU. Pembayaran solar biasanya setelah nelayan mendapat semua uang hasil penjualan ikannya. Nelayan pancing rata-rata memerlukan 300 liter solar/trip, sehingga terdapat kerugian lagi sebesar Rp 300.000,00 per trip. Namun besaran ini tergantung pada ukuran kapal dan jangkauan daerah penangkapannya.

Dengan demikian kerugian minimal nelayan pancing/rumpon yang hanya berasal dari penjualan hasil tangkapan adalah Rp 700.000,00/trip atau Rp 2.800.000,00/bulan dan apabila ditambah dengan kerugian akibat pembelian solar pada pengecer Rp 300.000,00/trip maka total kerugian adalah Rp 1000.000,00/trip atau Rp 4.000.000,00/bulan.

Nelayan bagan umumnya tidak meminjam uang ke tengkulak karena biaya operasional tidak terlalu besar yaitu sekitar Rp 60.000,00 untuk bagan skala kecil. Biaya operasional tersebut antara lain untuk pembelian minyak tanah untuk lampu, umpan, air bersih dan sewa perahu untuk mengangkut ikan ke darat. Lama operasionalnya adalah sekitar 3 hari. Nelayan sendiri yang melakukan pemasaran hasil tangkapannya.

Nelayan *gillnet* umumnya meminjam uang kepada bakul-bakul dan atau pengolah yang berlokasi di sekitar pelabuhan. Pengembalian pinjaman dengan menjual hasil tangkapan kepada bakul atau pengolah tersebut setelah dipotong jumlah pinjaman. Nelayan *gillnet* rata-rata menangkap ikan 125 kg/trip dan perbedaan harga ikan di konsumen langsung dengan di tengkulak antara Rp 2.000,00-Rp 4.000,00/kg sehingga secara total merugi Rp 250.000,00- Rp 1.000.000,00/trip. Sama halnya dengan nelayan pancing, hasil penjualan tidak dibayar secara cash oleh tengkulak atau menunggu rata-rata 3 hari sampai hasil tangkapan terjual kembali oleh tengkulak. Selama masa tunggu pembayaran, biasanya nelayan beristirahat sambil memperbaiki alat tangkapnya. Rata-rata *fishing trip* nelayan *gillnet* adalah 2 hari. Dengan demikian apabila masa *fishing trip* ditambah masa tunggu pembayaran, maka dalam sebulan nelayan *gillnet* melakukan sekitar 5 trip atau nelayan merugi Rp 1.250.000,00- Rp 5.000.000/trip.

Sama halnya dengan nelayan pancing, kerugian lain pada sebagian nelayan *gillnet* secara kuantitatif tidak ada karena nelayan tersebut membeli sendiri bahan perbekalan seperti solar, es dan air bersih sehingga total kerugian nelayan *gillnet* hanya berasal dari penjualan hasil tangkapan yaitu Rp 250.000,00-Rp1.000.000/trip atau Rp

1.250.000,00-Rp 5.000.000,00/bulan. Namun bagi sebagian nelayan *gillnet* yang meminjam solar pada pengecer seperti halnya nelayan pancing, maka kerugiannya ditambah Rp 100.000,00/trip karena rata-rata nelayan *gillnet* memerlukan 100 liter solar/trip. Dengan demikian total kerugian nelayan tersebut minimal adalah Rp 350.000/trip atau Rp 1.750.000,00/bulan.

Kerugian lain selain akibat peminjaman modal adalah kerugian tidak langsung yaitu sebagai akibat terbatasnya es yang dibawa ke kapal oleh nelayan pancing sehingga sebagian (30%) dari hasil tangkapan mutunya menurun. Hasil tangkapan ini sering disebut dengan kualitas BS, berupa ikan hasil tangkapan awal yang tidak diberi es, yang harganya rata-rata menurun Rp 4.000,00/kg dari harga normal, sehingga 30 % hasil tangkapannya (115 kg), nelayan merugi Rp 460.000,00.

Tidak tersedianya fasilitas pelabuhan seperti *cool room*, terbatasnya penyediaan air bersih dan es dapat menimbulkan kerugian karena menurunkan kualitas hasil tangkapan yang berakibat menurunnya harga jual ikan.

Besarnya keuntungan tengkulak/pengijon

Sistem pemasaran seperti yang ada saat ini tentunya banyak menguntungkan pemilik modal dalam hal ini tengkulak atau pengijon atau bakul. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa kerugian nelayan atau berarti keuntungan tengkulak akibat penjualan hasil tangkapan karena keterikatan modal adalah Rp 2.000,00 - Rp 5.000,00/kg. Keuntungan selanjutnya dari penjualan ikan tengkulak ke pedagang adalah antara Rp 3.000,00 - Rp 5.000,00/kg dari harga pasar atau apabila dihitung dari harga dasar pembelian ke nelayan, keuntungannya adalah Rp 5.000,00 - Rp 1.000.000/kg ikan. Keuntungan tersebut karena pembayaran ke tengkulak atau ke bakul dilakukan setelah ikan laku terjual oleh pedagang atau tidak dibayar secara cash ke tengkulak. Dengan demikian tengkulak/pengijon/bakul mendapatkan keuntungan melalui dua kali pemberian pinjaman yaitu ke nelayan dan ke pedagang.

Berbagai kerugian yang dihadapi nelayan ini menjadikan tingkat kehidupan

nelayan terus menerus dalam kemiskinan khususnya untuk nelayan kecil. Struktur sosial dalam masyarakat nelayan kecil tersebut umumnya dicirikan oleh kuatnya ikatan patron-klien. Hal ini terjadi karena konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh resiko dan ketidakpastian. Di satu sisi, nelayan menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting dan mudah untuk menjaga kelangsungan kegiatannya sedangkan di sisi lain nelayan sebenarnya dirugikan dengan adanya ikatan patron ini. Hal ini terus terjadi karena nelayan belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonominya. Kondisi yang terjadi ketika jumlah hasil tangkapan kurang baik, nelayan kekurangan uang dan pada akhirnya melepas barang-barang yang mudah dijual untuk kehidupan sehari-hari, selanjutnya nelayan akan hutang kepada patron/tengkulak dengan jaminan ikatan pekerjaan atau hasil tangkapan yang dijual kepada tengkulak dengan harga lebih murah dari harga pasar. Menurut Satria, 2009 di Sape NTB bahwa patron membeli hasil tangkapan nelayan lebih murah Rp 5.000,00/kg lebih rendah dari harga pasar.

Keterikatan nelayan-patron/tengkulak /pengijon ini pada umumnya terus berlanjut dan nelayan tidak mengetahui sampai kapan dapat melunasi hutangnya. Di PPN Palabuhanratu para nelayan ini hanya tahu berapa sisa hutangnya saja dari nakhoda kapal yang mendapat informasi dari patron, tanpa adanya transparansi catatan jumlah pinjaman dan angsuran pembayaran yang dilakukan. Saat pembayaran nelayan hanya diberitahu jumlah ikan hasil tangkapan dan harga ikan yang ditawarkan oleh bakul pengijon.

Patron ini bisa berupa bakul ikan dimana dalam banyak kasus di lapangan, hubungan jual-beli ikan antara para nelayan dan bakul atau pedagang sering bersifat "mengikat", daripada atas dasar "sukarela". Hal ini terjadi, karena para nelayan tersebut secara rutin dan berkesinambungan mendapatkan "uang pengikat" (ijon) dari para bakul ikan. Terjadinya ijon ikan hasil tangkapan kepada nelayan memang telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya, namun praktik jual beli dengan cara ijon berkembang

pesat saat pelelangan ikan di TPI PPN Palabuhanratu tidak berlangsung. Pedagang ikan, pengusaha pengolahan mengalami kesulitan untuk membeli ikan karena tidak adanya penjualan ikan yang terpusat seperti pelelangan sehingga mereka (pedagang ikan, pengusaha pengolahan) melakukan ijon kepada nelayan untuk memudahkan mereka mendapatkan ikan hasil tangkapan.

Uang ijon tersebut merupakan “uang muka” dari bakul ikan kepada para nelayan. Pemberian uang tersebut tujuannya tidak lain adalah agar para nelayan menyerahkan atau menjual ikan kepada si bakul ikan. Menjadi “kewajiban” atau “keharusan” bagi para nelayan penerima uang tadi untuk menjual atau menyerahkan sebagian atau seluruh ikan hasil tangkapannya (sesuai dengan kesepakatan) kepada bakul pengijon yang telah memberinya uang. Kecenderungan para nelayan untuk menjual ikan kepada bakul pengijon yang telah “mengikatnya” dengan uang ijon lebih disebabkan pada pertimbangan kecepatan dan kemudahan menjual ikan serta memperoleh uang, atau hal-hal praktis lainnya daripada semata-mata pertimbangan bisnis-ekonomi yang berorientasi pada mencari untung sebesar-besarnya. Sebab saat itu pelelangan ikan sedang tidak berlangsung. Proses peminjaman dana operasional melaut yang mudah seperti tidak ada agunan dan syarat administrasi perbankan lainnya membuat bakul pengijon menjadi lembaga keuangan nonformal yang sangat diminati oleh nelayan.

Peminjaman modal operasional untuk nelayan pancing/rumpon oleh bakul pengijon diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah berbeda tergantung pada kekurangan biaya nelayan saat akan melakukan operasi penangkapan ikan. Seperti juga disebutkan oleh Purba *et al*, 2008 bahwa masyarakat pesisir Indonesia utamanya nelayan pada tahun 2006, hanya 13 % saja yang mampu mengakses perbankan sedangkan sisanya 87 % mengandalkan modal sendiri atau pinjam pada lembaga non formal. Hal ini dikarenakan sulitnya persyaratan dari lembaga formal dalam memberikan pinjaman uang karena tidak adanya jaminan dan kepercayaan. Selanjutnya dikatakan bahwa

masalah penjaminan, memang hampir semua lembaga keuangan formal mempermasalahkan lemahnya kemampuan nelayan. Lembaga keuangan, umumnya mengharapkan jaminan berupa sertifikat tanah, rumah, dan lainnya yang tidak bergerak, sedangkan nelayan umumnya mempunyai perahu yang sifatnya bergerak sehingga berpeluang untuk hilang atau tenggelam. Walaupun nelayan mempunyai rumah, umumnya tidak mempunyai sertifikat. Selama ini nelayan selalu berhubungan dengan lembaga non formal seperti bakul/tengkulak karena faktor kepercayaan yang diberikan baik sebagai teman maupun masih dalam lingkungan keluarga sendiri. Adapun besarnya pinjaman berpengaruh positif terhadap besarnya tunggakan, sehingga semakin besar nilai pinjaman yang diperoleh maka akan semakin besar pula beban cicilan yang harus dibayar. Di Kabupaten Indramayu setiap satu persen peningkatan jumlah pinjaman akan menyebabkan meningkatnya jumlah tunggakan 0,752 % (Asmara, 2007).

Berdasarkan hasil dan bahasan di atas maka terbukti bahwa dalam memasarkan hasil tangkapan selama belum adanya pelelangan ikan, maka patron yang lebih banyak mendapat keuntungan dibandingkan kliennya seperti nelayan dan seperti halnya ini sulit dilepaskan seolah-olah nelayan tidak menyadari kerugian yang dideritanya dan akhirnya faktor kapital/ modal menjadi sangat dominan dalam menentukan nasib nelayan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, pendapatan nelayan PPN Palabuhanratu berkurang cukup berarti sebagai akibat peminjaman modal melaut kepada lembaga non formal seperti tengkulak atau bakul. Untuk itu, perlu kiranya diciptakan suatu lembaga formal yang mampu memperjuangkan kepentingan nelayan terutama dalam hal perolehan modal. Organisasi tersebut haruslah sesuai dengan tingkat budaya sosial nelayan sehingga dapat menjadi institusi alternatif selain institusi patron-klien, yang selama ini telah merugikan nelayan dan berlaku secara turun menurun.

Sehari sebelum berakhirnya penelitian ini telah dilangsungkan pelelangan ikan di TPI Palabuhanratu dengan harapan aktivitas lelang ini dapat memberikan solusi terhadap harga jual ikan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A. 2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tunggalan Keradit pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indoneisa*. Vol 12 No. 2 : 100-107
- Purba, CB, J. Haluan, D. Simbolon, S. Hariwisudo. 2008. Model Pengembangan Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap dengan Lembaga Keuangan di Kabupaten Indramayu. *Buletin PSP (Jurnal ilmiah Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap)*. Vol. XVII No.3 : 297-305
- Satria, A. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. PT. LKiS. Yogyakarta
- Sinuligga, A. 2011. *Sistem Ekonomi Tengkulak pada Masyarakat Nelayan*. [terhubung tidak berkala]. <http://www.analisadaily.com>. 21 April 2011.
- Sudarso, 2007. Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkotaan. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Tahun XX No 2 April 2007. Jurusan Sosiologi FISIP. Universitas Airlangga. [terhubung tidak berkala]. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Tekanan%20Kemiskinan%20Struktural.pdf>
- Lubis, E, AB. Pane, T. Nugoho dan M. Syahrir. 2009. *Model Pelelangan Ikan Optimal di Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan*. Laporan Hibah Kompetitif Penelitian Prioritas Nasional. Batch. 4. IPB. Bogor